

Civitas akademika Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM
MENGUCAPKAN SELAMAT DAN SUKSES
 kepada wisudawan dan wisudawati Periode IV Tahun 2018
SEMOGA SUKSES DALAM MERAIH MASA DEPAN

Wisudawan/Wisudawati Prodi Ilmu Pemerintahan Periode IV Tahun 2018



RIZAL ZULMI
 201410050311012



MUHAJI WIJAYA
 201310050311164



PUNGKY SEPTIAN HERLAMBA
 201410050311120



MOH. AFFAN HAKAM
 201310050311059



SULUNG SATRIYO IRKHAM P
 201310050311125



MUH. FAJRIN FADILAH
 201210050311081



KIKY DWI KURNIAWATI
 201410050311007



NOVI UTAMI PUTRI R.
 201410050311052



YOLANDA KRISTY
 201410050311080



JANU TAYA WIRATAWANG
 201410050311174



SHELLA FEBRIAN SAPUTRI
 201410050311182



PUJI SETIAWAN
 201410050311092



ELLY EKA NIRWAN
 201410050311177



WAHYU KARONIA PUTRI
 201410050311149



FEFTAMAS ARIFANDI
 201310050311060



UTAMI DINI SAPUTRI
 201410050311039



NURI ZATI SEPTI WULANDARI
 201410050311178



WILDAN KHOIRUL UMAM
 201410050311086



DELLY APRILIA EFENDI
 201410050311061



NUR ASRI HANDAYANI
 201410050311046



MERITA INDRACHMAWATI
 201410050311023



SYASYANA PUTRI ANDALIYA
 201410050311091

Pengarah Redaksi : Salehudin, S.IP., M.SI., M.PA.
 Pemimpin Redaksi : Asep Nurjaman, Tri Sulistyandingsi, Krishna Hadi, Yana S. Hiji,
 Redaktur Pelaksana : Ach. Apriyanto Romadhan, Muhammad Karnil
 Tata Usaha dan Dokumentasi : Jaimri, Hevi Kurnia Hardini
 Reporter : Aulia, Indah Dwi Maulana, Listiana Asworo, Lacy Nur Khanifah, Idris Taqwa S.
Diterbitkan oleh Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UMM
 Jl. Raya Tlogomas 246 Malang Telp. 0341-466318 Psw.131
 Website : pemerintahan.umm.ac.id
 Email : ipumm.28@gmail.com; ipem.umm86@gmail.com
 Redaksi menerima tulisan mahasiswa melalui karya tulis secara bebas, dinamis, dan kreatif.
 Penyerahan naskah tulisan dimulai pada acara wisuda sampai dua minggu sebelum wisuda periode berikutnya.



ProdIP News

Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP-UMM

Strengthening Effective Government



Diterbitkan Oleh Prodi Ilmu Pemerintahan
 Website: pemerintahan.umm.ac.id

Edisi IV/TH XIV/November/2018

Salam ProdIP News

Urgensi Pembekalan Paham Radikalisme dan Separatisme untuk Mahasiswa Baru 2018

Pembaca Prodip News Edisi IV 2018 yang budiman, pada salam edisi kali ini Program Studi Ilmu Pemerintahan (Prodi IP) FISIP UMM, dengan bangga menyampaikan serangkaian kegiatan Prodi dalam kurun waktu September - November 2018. Kegiatan tersebut yakni kuliah umum sekaligus memperkuat kerjasama antara Program Studi (Prodi) Ilmu Pemerintahan FISIP-UMM dan *College of Local Administration (COLA)*, Universitas Khon Kaen, Thailand, Pembekalan Paham Radikalisme dan Separatisme untuk Mahasiswa Baru 2018 dan diskusi Publik dengan Tema Praktik Korupsi dan Mafia APBD dan Kegiatan Perkenalan Civitas Akademika Prodi dengan Mahasiswa Baru Ilmu Pemerintahan 2018. Kegiatan lainnya adalah *Family Gathering* yang diadakan oleh HIMAP dan aksi refleksi Hari Santri.

Periode ini berlangsung disaat penerimaan Mahasiswa Baru sehingga aktivitas Prodi IP UMM lebih difokuskan untuk menyambut kedatangan mereka dengan kegiatan-kegiatan internalisasi nilai-nilai dasar dunia perkuliahan beserta tantangannya. Prodi IP menyadari betul bahwa mahasiswa baru perlu mendapatkan pemahaman awal yang komprehensif mengenai atmosfir lingkungan barunya beserta proses dinamika yang akan dilalui. Pembekalan seperti ini penting untuk mempersiapkan mental dan pengetahuan mahasiswa baru agar lebih berdaya saing tinggi dimasa depan. Dengan pengenalan seperti ini diharapkan semangat mahasiswa baru untuk terus belajar dan berusaha terus terjaga dan berkembang. []

* Pengarah Redaksi,
 dan Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UMM.



Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan UMM
 Salehudin, S.IP., M.SI., M.PA.

Government Science Activities

Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP-UMM dan College of Local Administration (Cola) Universitas of Khong Kaen, Thailand Perkuat Kerjasama

Sebagai salah satu program studi unggulan, Prodi IP terus berbenah dan berkembang. Prodi IP hadir sebagai bagian dari *epistemic community* yang berkembang seiring dengan perkembangan jaman. Melalui program kerjasama atau kemitraan dengan Universitas Luar Negeri, Prodi IP ingin membuktikan sekaligus mewujudkan Visi Prodi yakni, menjadi pusat pendidikan yang unggul dalam pengembangan ilmu serta praktik pemerintahan bertaraf Internasional untuk mendukung terwujudnya *effective government* sebagai pengejawantahan nilai-nilai Islam. Universitas Khon Kaen, Thailand, menjadi salah satu mitra atau partner Prodi IP dalam mencapai visi tersebut.

Prodi Ilmu Pemerintahan sukses menyelenggarakan *International Guest Lecture* dengan mengundang Dekan College of Local Administrations (COLA), Universitas Khon Kaen, Thailand, Assoc. Prof. Dr. Supawatanakorn Wongtanavhasu (17/10). Acara ini digelar di Aula Lt.9, Gedung Kuliah Bersama (GKB IV), Universitas Muhammadiyah Malang. Kehadiran



Kaprodi dan Jajaran Dosen Prodi IP UMM bersama dengan Prof Supawatarakorn, Dekan College of Local Administration (COLA), Universitas Khon Kaen, Thailand. Dalam Sesi Foto Bersama

Dekan COLA ke Universitas Muhammadiyah Malang, merupakan langkah konkrit dalam mewujudkan program studi yang bertaraf Internasional. Beliau memberikan kuliah umum dihadapan 420 mahasiswa Ilmu Pemerintahan dengan topik bahasan Pelayanan Sektor Publik di Thailand. Kegiatan ini sukses membuat mahasiswa antusias untuk mengikuti Kuliah Tamu. Acara ini sendiri dibuka langsung oleh Wakil Dekan I, Dr. Dyah Estu Kurniawati, M.Si, dan Kaprodi IP, Salahudin, M.Si, M.PA, juga memberikan kata sambutan.

Kegiatan *International Guest Lecture* ini merupakan bagian dari rangkaian kerjasama yang telah disepakati (MoU). Sebelumnya, enam mahasiswa Ilmu Pemerintahan tengah mengikuti program *Student Exchange* di COLA, Universitas Khon Kaen, Thailand, selama satu bulan. Selama di sana, mahasiswa Ilmu Pemerintahan mengikuti perkuliahan dan belajar budaya serta tradisi setempat. Program ini nantinya akan digarap secara serius antara Prodi IP dan COLA agar bisa berlanjut menjadi *transfer credit*. []

Tangkal Paham Radikalisme dan Separatisme, Prodi IP Bekali Mahasiswa Baru dengan Internalisasi Kebangsaan

Rabu (12/9) bertempat di Aula GKB 3 Lantai 6, Prodi Ilmu Pemerintahan bekerjasama dengan Himpunan Mahasiswa Pemerintahan (HIMAP) menggelar Kuliah Perdana bertajuk "Internalisasi Pemahaman Kebangsaan di Era Millennial Menuju Bangsa yang Berkemajuan". Kuliah Perdana ini menghadirkan Dosen Senior IP sebagai pembicara yaitu, Heru Mulyono, S.IP, M.T, dan Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si, yang dimoderatori oleh Listiana Asworo, S.IP, MA. Kegiatan ini juga diikuti oleh 300 mahasiswa baru Prodi Ilmu Pemerintahan.

Mengawali rangkaian kegiatan, Kaprodi Ilmu Pemerintahan, Salahudin, S.IP, M.Si, M.PA, memberikan sambutan sekaligus membuka Kuliah Perdana ini. Di dalam kata sambutannya, beliau menyampaikan jika mahasiswa sekarang ini sedang menghadapi persoalan bangsa yang begitu kompleks. Mulai dari aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, serta keamanan. Untuk itu beliau berpesan agar mahasiswa baru hendaknya memiliki empati dan berpikir solutif atas permasalahan bangsa dan negara.

Berangkat dari refleksi atas persoalan bangsa dan negara, khususnya ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari paham-paham radikalisme, separatisme, dan fundamentalisme, Kuliah Perdana ini bertujuan untuk menanamkan kembali rasa cinta terhadap Tanah Air melalui internalisasi kebangsaan ke dalam diri mahasiswa. Jika Negara-Negara maju sudah membicarakan tentang *artificial intelligence*, penghitungan tangkapan karbon, rekayasa genetika, Indonesia masih harus menguatkan pondasinya dari serangan gerakan-gerakan ekstrimis yang hendak memecah-belah Indonesia. Apalagi, di era Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan penggunaan teknologi yang kian masif, ancaman dan tantangan terhadap keutuhan NKRI



Narasumber ku... ah perdana Heru Mulyono (tengah), Sekretaris Kasbarpol Kota Malang dan am sesi foto bersama jajaran Dosen Prodi IF UMM dan Himpunan Mahasiswa Jurusan IP

menjadi semakin berat. Teknologi sebagai ciri era modern, justru dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk menyebar ujaran kebencian, menyebar aliran-aliran radikalisme dan separatisme. Sementara, pengguna teknologi tersebut paling banyak diwakili oleh kalangan muda. Sehingga, paham-paham ekstrim ini sejatinya secara langsung menasar kalangan muda. Untuk menangkal gerakan radikal dan separatis tersebut, yang perlu dilakukan adalah reaktualisasi peran. Jika dahulu, internalisasi wawasan kebangsaan dilakukan dengan cara

indoktrinasi-sosialisasi, kini harus disesuaikan dengan perubahan jaman menjadi demokratis-emanisipatoris. Maknanya, wawasan kebangsaan tidak hanya diberikan melalui sosialisasi tetapi juga harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari.

Heru Mulyono menegaskan bahwa kaum muda harus peka atau sensitif terhadap persoalan dan ancaman bangsa, baik ancaman yang berasal dari eksternal maupun internal, ancaman bersifat militeristik maupun non-militeristik. Untuk menanggulangi bahaya tersebut, Heru Mulyono berpesan kepada mahasiswa untuk selektif dalam memilih organisasi yang akan diikuti. Heru Mulyono juga menyampaikan bahwa kaum muda harus memiliki jiwa semangat, gotong royong dan sikap toleransi yang tinggi. Senada dengan Heru, Tri Sulistyaningsih juga berpendapat bahwa generasi milenial harus melek politik, tidak boleh apatis, peka terhadap permasalahan bangsa, serta menghindari ujaran-ujaran palsu dan provokatif. Sebagai mahasiswa UMM Malang, sudah seyogyanya mahasiswa baru Ilmu Pemerintahan juga mengamalkan nilai-nilai atau ajaran muhammadiyah dalam kehidupan sehari-hari agar karakter dan kepribadian bangsa tidak hantur tergerus arus modernisasi dan globalisasi. []

6 (Enam) Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan UMM "Sit In" di Luar Negeri

Setelah konsisten memperluas kerjasama dengan beberapa perguruan Tinggi di Malaysia, IP UMM juga konsisten melakukan kerjasama dengan Khon Kaen University Thailand. Sebanyak 6 (Enam) Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UMM angkatan 2015 melaksanakan International Sit In Program di College of Local Administration (COLA) Khon Kaen University sebagai upaya memperluas networking akademik melalui sit in



Mahasiswa & Perwakilan Dosen IP UMM diterima langsung Dekan COLA Assoc. Prof. Supawatana Kom Wongnanavasu beserta staf Dosen COLA

perkuliahan, Seminar dan Pengenalan Budaya Akademik di Thailand. Enam mahasiswa Prodi IP terpilih tersebut adalah M. Azhar Maulana, Tia Qonita, Tia Marwah, Rizal Patahngi, Ricky Yulian dan Lisnayani dan di damping oleh Muhammad Kamil,

serangkaian kegiatan akademik dan Culture Education yang dapat memberikan pelajaran kehidupan antara Indonesia dan Thailand. []

S.IP., MA sebagai Dosen Pendamping melaksanakan aktivitas di COLA selama 1 Bulan mulai 15 September hingga 17 Oktober 2018.

Diterima dengan sangat baik oleh pihak COLA Khon Kaen, IP-UMM berkomitmen memperkuat dan memperluas kerjasama ini kedepan. Rangkaian program Sit In di tahun ke-3, memberikan *international exposure impact* yang sangat baik bagi kedua belah pihak, terutama mahasiswa dengan

Prodi IP Gelar Diskusi Publik Bertema "Praktik Korupsi dan Mafia APBD"

Sabtu, 8 September 2018, Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP-UMM menyelenggarakan Diskusi Publik bertema "Praktik Korupsi dan Mafia APBD". Acara ini menghadirkan Bapak Luthfi J. Kurnian sebagai pegiat anti korupsi, Il Lookh Mahfudz mantan anggota DPRD Kota Malang periode 2009-2014, Bapak Edi Rudianto dari Pemuda Muhammadiyah dan Salahudin Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP-UMM. Acara yang dihadiri oleh sekitar 40 tamu undangan dari berbagai *stakeholder* baik itu praktisi, akademisi, advokat, jurnalis maupun dari NGO. Diskusi Publik ini membahas tentang akar masalah korupsi di tingkat lokal, terutama yang terjadi di kota Malang.

Dari hasil pemaparan pemateri setidaknya ada tiga temuan penyebab korupsi di kota Malang. *Pertama*, sistem kepartaian yang tidak terlembaga secara demokratis yang menyebabkan menguatnya partai politik oligarkis. Sehingga memunculkan kader maupun calon legislatif yang tidak memiliki integritas. Padahal partai politik merupakan pintu utama menuju kursi kekuasaan. *Kedua*, sistem proporsional terbuka yang liberal membuka celah terjadinya praktik



Luthfi Jayadi (baju kuning), Lakh Mahfudz (baju putih) sebagai pemateri diskusi publik dalam sesi foto bersama dengan peserta dan tamu undangan

money politic untuk memperoleh kursi kekuasaan. Politik biaya tinggi ini membuka celah masuknya donatur atau pengusaha untuk membiayai *cost* politik dengan kompensasi kebijakan anggaran dan pembangunan untuk memuluskan proyek-proyek mereka. *Ketiga*, penyebab korupsi adalah lemahnya kekuatan *civil society* sehingga proses politik kebijakan penganggaran di kooptasi oleh kepentingan elite eksekutif dan

legislatif. Karena ketiga sumber tersebut, korupsi di daerah dibajak oleh elit, baik itu oleh elite pemerintah maupun elite pengusaha, akibatnya anggaran pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat sulit terealisasi.

Solusi yang ditawarkan untuk memutus mata rantai korupsi adalah *pertama* perlu penguatan kelembagaan Partai politik yang demokratis untuk memutus kekuatan oligarkis di tubuh partai politik. *Kedua*, penguatan *civil society* untuk menumbuhkan gerakan moral dan kesadaran kolektif agar mengawal pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Terakhir, adalah menumbuhkan sikap asketis dan kengeragawan dari para pemimpin. []

Kiprah Mahasiswa

HIMAP Ilmu Pemerintahan FISIP UMM Gelar Gathering Dengan Mahasiswa Baru Angkatan 2018

Jumat, 9 September 2018 HIMAP FISIP-UMM gelar *Gathering* Mahasiswa Baru Ilmu Pemerintahan 2018. Kegiatan yang diadakan di Soimah Bar and Kitchen ini dilakukan dalam rangka menyambut kedatangan mahasiswa baru Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP-UMM. Acara yang dihadiri oleh mahasiswa baru prodi Ilmu Pemerintahan dan Pengurus Himap ini dihadiri dan dibuka oleh perwakilan dosen dari Prodi Ilmu Pemerintahan.

Kegiatan ini merupakan sarana pertukaran informasi, pengembangan pola pikir, daya nalar dan kreativitas mahasiswa yang diharapkan bermanfaat untuk Mahasiswa, baru Prodi Ilmu Pemerintahan. Selain itu kegiatan ini merupakan wadah pengembangan wawasan yang diharapkan mampu memberikan inovasi bagi mahasiswa, khususnya di bagi Pengurus Himpunan



HIMAP FISIP UMM dalam Sesi Foto Bersama Dengan Mahasiswa Baru Prodi Ilmu Pemerintahan Angkatan Tahun 2018

Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang sebagai sebuah kekuatan yang besar serta untuk menyegarkan dan menggali kembali potensi-potensi yang dimiliki oleh mahasiswa itu sendiri. Sehingga nantinya kegiatan ini akan membekas dan menjadi modal utama bagi mahasiswa untuk menjalankan perannya kembali sebagai elemen masyarakat yang punya ambisi

untuk melakukan perubahan karena memang disadari atau tidak peran mahasiswa adalah *agent of change* dalam strata masyarakat yang ada. Acara ini dilanjutkan dengan diskusi dan *sharing* seputar kehidupan kampus yang berlangsung dengan nuansa kegembiraan. Tujuannya adalah mempererat silaturahmi dan meningkatkan hubungan baik antara Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang dengan Mahasiswa Baru Ilmu Pemerintahan 2018. []

Pengenalan Prodi Ilmu Pemerintahan kepada Mahasiswa Baru Ilmu Pemerintahan 2018

Dalam rangkaian kegiatan pesmada dan student day tahun 2018, HIMAP mengadakan Pengenalan Prodi Ilmu Pemerintahan kepada Mahasiswa Baru Ilmu Pemerintahan angkatan tahun 2018. Acara yang dihadiri oleh seluruh mahasiswa baru angkatan tahun 2018 dan pengurus HIMAP tahun 2018 beserta seluruh dosen Prodi Ilmu Pemerintahan.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan dosen-dosen prodi dan iklim akademik di lingkungan Prodi Ilmu Pemerintahan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkenalkan



Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Membuka Acara Pengenalan Program Studi Kepada Mahasiswa Baru Ilmu Pemerintahan Angkatan 2018

pembelajaran di Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari rabu 4 September 2018 bertempat di Aula Masjid AR. Fachrudin Lantai 1 Universitas Muhammadiyah Malang. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan *sharing* seputar pembelajaran di Jurusan Ilmu Pemerintahan. Mempererat silaturahmi dan meningkatkan hubungan baik antara Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang dengan Mahasiswa Baru Ilmu Pemerintahan 2018. []

Dosen Ilmu Pemerintahan Ikuti FGD Pengembangan Organisasi Perpustakaan Nasional

Senin, 17 September 2018 Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM yang di wakili oleh Kaprodi IP Salahudin, S.IP, M.Si, M.P.A mengikuti FGD dalam rangka pengembangan organisasi Perpustakaan Nasional yang berlokasi di UPT Perpustakaan Bukit Tinggi. Kegiatan tersebut di hadiri oleh kepala bagian Hukum dan Organisasi Perpustakaan Nasional, Kepala UPT Perpustakaan Nasional serta seluruh struktural dari UPT Perguruan Tinggi guna membahas tentang pengembangan organisasi perpustakaan nasional dilihat dari aspek struktur, fungsi serta Sumber Daya Manusia (SDM).

Tujuan yang ingin dicapai dari FGD ini adalah pengelolaan perpustakaan yang lebih profesional sehingga dalam jangka panjang bisa menjadi tempat belajar yang nyaman bagi mahasiswa. Jika itu terpenuhi mahasiswa akan



Salahudin, S.IP, M.Si, M.P.A (kanan depan) sedang mengikuti pelaksanaan FGD

semakin peduli untuk meningkatkan kemampuan literasi kritisi melalui membaca sehingga dalam jangka panjang menghasilkan kualitas lulusan perguruan tinggi yang berdaya saing tinggi. Pada titik itulah, manajemen perpustakaan dituntut untuk bekerja secara profesional dengan meng-hadirkan kualitas layanan yang prima sehingga mahasiswa merasa puas dan menjadikan perpustakaan sebagai pusat pengembangan pengetahuan.

Hasil dari FGD tersebut adalah adanya kesepakatan untuk pengembangan struktur perpustakaan Nasional yang mendukung perpustakaan Nasional sebagai institusi pendidikan yang berperan mengembangkan penelitian, pendidikan, literasi serta pemberdayaan sosial ekonomi yang kemudian konsepnya disebut "*Hybrid Library Governance*". []

Magang Riset di Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI

Magang riset merupakan program wajib praktik pemerintahan yang harus diikuti oleh mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang yang tengah menempuh semester 7. Dalam magang riset tersebut, mahasiswa tidak hanya mendapat pengalaman bagaimana lingkungan kerja di instansi pemerintahan, namun mahasiswa juga harus melaksanakan riset sesuai dengan penelitian yang mereka pilih.

Dua mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang, yaitu Moch. Novrizal Dematheo dan Fitrotul Lathifah mendapat kesempatan untuk magang riset di Kementerian Sosial pada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial setelah mengikuti prosedur sesuai ketentuan yang ada di Kementerian Sosial. Prosedur tersebut yaitu dengan mengirimkan proposal



Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Magang di Kementerian Sosial RI

penelitian dan curriculum vitae.

Magang riset di Kementerian Sosial dimulai pada tanggal 3 September 2018, kedua mahasiswa tersebut ditugaskan masing-masing di Sekretariat Bagian Umum dan Sekretariat Bagian Program dan Pelaporan Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial. Adapun kedua mahasiswa tersebut ditugaskan di Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial tersebut karena disesuaikan dengan riset kedua mahasiswa tersebut mengenai Urgensi Taruna Siaga Bencana dalam Menanggulangi Bencana Alam di Nusa Tenggara Barat, dimana dalam struktur organisasi Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial tersebut terdapat Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.

Pada saat magang riset tersebut, mahasiswa mengambil narasumber salah satu tim TAGANA yaitu Pak Husin yang ikut terjun langsung saat terjadi bencana di NTB, pegawai di Direktorat

Perlindungan Sosial Bencana Alam biasa menyebutnya Sang Master TAGANA, karena sudah tak terhitung lagi beliau ikut serta menjadi relawan saat ada bencana di Indonesia. Pak Husin mengatakan bahwa, "Taruna Siaga Bencana atau biasa disingkat dengan TAGANA merupakan tim relawan untuk menanggulangi bencana."

Pada saat kami penelitian atau melakukan wawancara dengan Pak Husin, kami mendapatkan banyak pengetahuan dan ilmu baru soal penanganan kebencanaan tentu saja melalui peran aktif TAGANA. Yang biasa disebut juga ujung tombak PSKBA ketika terjadinya bencana diberbagai daerah, Pak Husin banyak menceritakan pengalaman dilapangan yang sangat menginspirasi kami dimana beliau pernah diarah oleh perampok ketika mendistribusikan bantuan pangan, obat-obatan, pakaian ke Palu dan ketika beliau dan tim TAGANA yang hamper terkona tanah longsor ketika berada di Sumatera Utara. Selain nyawa yang menjadi taruhan juga terkadang beban mental juga mereka dapat, seperti ketika bencana gempa di NTB dimana Pak Husin dan timnya ingin menjangkau daerah terpencil guna

menyalurkan bantuan namun terjebak oleh jalan yang rusak karena bencana sehingga akomodasi pun terhambat dan tak urung banyak protes dan hinaan yang didapat.

Selain mendapatkan pengalaman berharga dari hasil wawancara dengan Pak Husin, kami juga belajar banyak mengenai cara kerja sekretariat. Dimana sangat berperan penting menjadi penghubung di beberapa bagian Linjansos juga, diantaranya kami sering melakukan koordinasi dengan bagian lain, berdiskusi dengan bagian lain, dan mengikuti rapat koordinasi bersama bagian PSKBA, JSK, dan PSKBS. Mungkin bila kami berada diantara bagian tersebut tidak akan mendapat pengalaman untuk saling berkomunikasi dengan bagian lainnya sebab bagian-bagian tersebut sudah terfokus dengan peran dan tuisi mereka sendiri-sendiri. Jadi kami sangat bersyukur berada dibagian sekretariat.

Terima kasih untuk waktu 2 bulan yang begitu berarti bagi kami dan tidak akan pernah kami lupakan, terima kasih untuk Jurusan Ilmu Pemerintahan yang memberikan kepercayaan kepada kami berdua serta Kementerian Sosial RI yang telah mau menerima kami magang, kami haturkan banyak terima kasih. []

Opini Mahasiswa

Santri Dalam Pergerakan Kemerdekaan

Dalam rangka mencapai kemerdekaan Indonesia tentu tidak semudah mengedipkan mata. Butuh perjuangan fisik hingga pengorbanan darah dalam medan pertempuran demi mengusir segala bentuk penjajahan yang menindas dan merendahkan harkat dan martabat manusia Indonesia. Dalam pergulatan perjuangan kemerdekaan yang melibatkan segenap elemen bangsa, mulai dari tokoh nasionalis hingga para tokoh tertama dari kalangan ulama dan santri bersatu padu dalam panji nasionalisme dan patriotisme untuk berjuang bersama dalam satu wadah identitas kebangsaan guna melawan penjajah.

Bukan waktu yang singkat negara Indonesia mengalami penderitaan di bawah bayang-bayang kolonialisme. Kondisi tersebut menumbuhkan kesadaran untuk melakukan upaya perjuangan kemerdekaan, salah satunya dilakukan oleh golongan nasionalis religius. Empat ulama yang terdiri dari Sayyid Abdurrahman, Sayyid Muhammad, Sayyid Al Fahir dan Sayyid Sehan melakukan pertemuan untuk membahas dan mengidentifikasi penghambat kemerdekaan Indonesia. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan dalam menerjemahkan kondisi permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam melakukan perjuangan kemerdekaan, antara lain kurangnya persatuan dan kekompakan, kurangnya koordinasi, kurangnya peningkatan dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, maupun usaha dan perdagangan.

Untuk menghadapi kondisi problematis tersebut dibentuklah "Jami'atul Khoir". Tujuannya untuk mengkoordinasikan perjuangan pergerakan kemerdekaan dari berbagai aspek, dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam bidang pendidikan bergabunglah para ulama dari berbagai daerah termasuk KII Ahmad Dahlan yang pusat pergerakannya berada di jogja. Dari segi usaha dan perdagangan solo dijadikan sebagai pusat pergerakan yang dipimpin oleh Syekh Sanian Hudi. Dari segi politik berpusata di Surabaya yang dipimpin langsung oleh H. Omar Said Cokrominoto yang salah satu muridnya Ir. Soekarno menjadi proklamator kemerdekaan. Perjuangan yang menghabiskan waktu selama 34 tahun tersebut membuahkan kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada Tanggal 17 agustus



Mahasiswa Prodi Il' HIM-UMM yang bergabung dalam Ikatan Santri di Malang sedang memperingati Hari Pahlawan

1945 Indonesia menyatakan kemerdekaan.

Namun demikian perjuangan kemerdekaan tidak cukup sampai disitu karena dalam hitungan bulan pasca proklamasi kemerdekaan, Belanda datang melakukan agresi militer. Menghadapi kondisi darurat militer tersebut Presiden Soekarno mengutus Jendral Sudirman untuk menemui dan meminta nasihat kepada KH. Hasym As'ari, seorang tokoh religius yang disegani oleh golongan santri maupun nasionalis. Kedatangan Jendral sudirman untuk meminta pendapat terkait

jihad membela negara. Dengan jiwa perjuangan yang sudah kokoh KII. Hasyim As'ari mengumpulkan tokoh-tokoh agama untuk membahas permasalahan yang meresahkan Indonesia. Singkatnya pada pertemuan itu di dapatkan sebuah keputusan pada tanggal 22 oktober 1945 yaitu resolusi jihad. Dengan semangat Kiyai dan para santri dan juga tokoh phalawan tidak lupa pula para tentara yang dipimpin bung tomo Indonesia mampu mengusir penjajah yang mau mengusik kemerdekaan Indonesia, pertempuran di Surabaya mampu menumbangkan para tentara-tentara penjajah. Tanggal 22 oktober merupakan gerbong dari tragedi 10 november, tentu jika tidak ada resolusi jihad maka 10 november bukan tidak mungkin akan pernah ada peringatan hari pahlawan. Maka tentu suatu kehormatan 22 oktober di jadikan sebagai hari santri nasional.

Dalam rangka menyambut dan memperingati hari santri nasional 22 oktober 2018 mahasiswa prodi ilmu pemerintahan yang berafiliasi dengan ikatan santri yang ada di Malang melakukan peringatan hari santri nasional sekaligus memperingati hari pahlawan. Kegiatan ini dilaksanakan di taman Malsam Pahlawan Malang. Kegiatan ini dipelopori oleh FKMSB (Forum Komunikasi Mahasiswa Santri Banyuwangi), IMABA (Ikatan Mahasiswa Bata-bata), dan HIMASPA (Himpunan Alumni Sumber Bungur Pakong) para mahasiswa yang ada di Malang ikut andil dalam menyambut hari santri nasional yang merupakan momentum sakral untuk mengenang para kiyai dan santri yang telah gugur dalam resolusi jihad dan juga untuk mengingat sejarah yang terjadi pada 22 oktober 1945. Tidak lain dan tidak bukan tujuan diadakan turun jalan ini guna untuk mengingat, memperingati dan juga mendoakan para kiyai dan santri yang telah gugur pada tragedi resolusi jihad. []

Strategi Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Malang Berbasis *Collaborative Governance* (Studi kasus di Dinas Kesehatan Kota Malang)



Oleh : Rizal Zulmi

Dewasa ini penyakit menular seksual telah menjadi suatu ancaman yang besar bagi penduduk dunia yang mana bukan hanya masalah ekonomi, sosial dan budaya, tetapi permasalahan kesehatan juga turut mengambil peran yang cukup besar pada permasalahan yang ada di dunia. Pemberantasan penyakit menular tersebut yang merupakan salah satu bagian dari pembangunan kesehatan yang menjadi tujuan besar dari negara-negara dibelahan dunia. Di Indonesia, sejak pertama kali ditemukannya infeksi HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) pada tahun 1987, HIV tersebar di 368 dari 497 kabupaten/kota di seluruh provinsi. Pulau Bali adalah provinsi pertama tempat ditemukannya infeksi HIV/AIDS di Indonesia. Jumlah kasus bertambah menjadi 225 di tahun 2000. Sejak itu kasus HIV/AIDS bertambah cepat dipicu oleh penggunaan napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) suntik. Pada tahun 2006 sudah terdapat 8.194 kasus HIV/AIDS. Juni 2009 dilaporkan 17.669 HIV/AIDS, 15.608 dari golongan waria, usia produktif 25-49 tahun (88%). Kemudian lebih mengerucut bahwa dari data Dinas Kesehatan Kota Malang mulai dari tahun 2005-2016 Kota Malang memiliki 3.273 kasus pengidap HIV maupun AIDS yang mana dari jumlah tersebut jenis pengidapnya yaitu mulai dari bayi hingga lansia.

Melihat banyaknya kasus HIV/AIDS di Indonesia semakin besar oleh sebab itu pemerintah membentuk suatu Komisi Penanggulangan AIDS Nasional yang mana bersifat lintas sektor dengan melalui Keputusan Presiden Nomer 36 Tahun 1994 tentang pembentukan KPA di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/ kota hanya untuk fokus pada penyelesaian kasus HIV/AIDS di daerah-daerah.

Penggunaan Strategi *Collaborative Governance* pada kasus HIV/AIDS

Banyaknya penanganan yang dilakukan pemerintah kota Malang dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS ini menciptakan suatu bentuk nyata bahwa pemerintah kota Malang memberikan suatu perhatian yang besar terhadap masalah ini, tetapi melihat pencegahan dan penanggulangan yang diberikan seperti halnya pengaplikasian program, penyuluhan, edukasi, dan lainnya bahwa bukti nyata manfaat yang diberikan belum terlihat secara signifikan, oleh sebab itu pemerintah Kota Malang mengambil langkah untuk menjalankan strategi *Collaborative Governance* untuk bisa memudahkan dalam hal pembagian kerja dan bantuan dana.

Menurut Chris Anshel bahwa adanya penggunaan *Collaborative governance* dalam pemerintahan itu bukan dari adanya keterpaksaan atau dorongan individu tetapi adanya

suatu dorongan bersama untuk merealisasikan kolaboratif antar kelompok atau lembaga. Kemudian alasan yang lain adanya penggunaan strategi ini juga didasari dari besarnya permasalahan yang dihadapi yang dengan itu harus mendatangkan suatu bantuan yang besar juga. Oleh sebab itu pemerintah Kota Malang menganggap bahwa permasalahan ini sudah masuk pada fase yang luas yang mana dalam penyelesaiannya harus menggunakan strategi kolaboratif atau *Collaborative governance*.

Pelaksanaan tata kelola Kolaboratif dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di kota Malang

Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di kota Malang yang dilakukan oleh pemerintah kota Malang sangatlah aktif mulai dari dibangunnya suatu kebijakan sampai terbentuknya suatu program pencegahan HIV/AIDS. Pada pelaksanaannya pemerintah memilih untuk melaksanakan kerja sama dengan beberapa lembaga seperti KPAI, LSM, OPI, dan juga dari beberapa swasta. Bergeraknya program pencegahan HIV/AIDS seperti program mobile klinik, ARV, VCT, sosialisasi, penyuluhan dan edukasi sesuai dengan kebijakan Pelayanan Kesehatan sebagai pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di daerah Kota Malang (Peraturan daerah Kota Malang No. 12 Tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan) yang mana dalam pelaksanaannya sendiri dilakukan secara berkolaboratif dengan lembaga-lembaga yang ditunjuk. Kemudian dalam tata kelola kolaboratif pada pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS ini juga harus memperhatikan beberapa aspek yakni seperti komunikasi, musyawarah, forum dialog, dan berorientasi konsensus yang mana ini semua merupakan suatu penunjang kesuksesan jalannya kolaboratif antar lembaga.

Dengan memperhatikan aspek-aspek mengenai kolaboratif yang dilakukan oleh pemerintah kota Malang dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS bahwa ada beberapa hasil yang dampaknya sangat terlihat yakni adanya suatu penurunan angka kematian sebab AIDS yang mana dilihat dari data yang didapat bahwa adanya penurunan angka kematian disebabkan AIDS dari mulai tahun 2009-2015, walaupun memang pada tahun 2013 mengalami peningkatan tetapi tidak menjadi suatu permasalahan yang cukup besar karena pada tahun 2014-2015 angka kematian AIDS dipastikan menurun. Selain itu hasil yang didapat dengan pelaksanaan kolaborasi yakni tercipta suatu hubungan dan komunikasi yang baik antar lembaga, serta banyaknya ide dan program dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. []

Pengelolaan Sampah Berbasis Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat di Kota Batu

Sampah merupakan ancaman bagi keindahan, kebersihan atau bahkan kesehatan suatu kota. Terlebih juga di Kota Batu yang memiliki *branding* sebagai kota pariwisata internasional. Pasalnya ancaman akan sampah tidak main-main, tiap tahunnya Kota Batu mengalami fluktuasi sampah. Pada tahun 2016 Kota Batu menghasilkan 70 ton

sampah/hari dan meningkat menjadi 80 ton/hari di tahun 2017. Jumlah tersebut masih dapat bertambah di hari libur yang mana Kota Batu dapat menghasilkan 100 ton sampah/hari. Atas permasalahan tersebut maka, seyogyanya bagi Pemerintah Kota Batu melakukan langkah strategis penanganan dan pengelolaan sampah berbasis *Reduce, Reuse, Recycle* atau 3R sesuai



Oleh: Sulung Satriyo Iriharn

dengan amanat Undang-Undang No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Lebih lanjut, pemerintah juga perlu melibatkan peran serta masyarakat melalui komunitas bank sampah untuk melakukan pengelolaan sampah dari hulu dan tidak hanya bertumpu pada kapasitas TPA Tlelungsemata.

Collaborative Governance sebagai Panacea
?Pergeseran paradigma dalam studi ilmu pemerintahan memunculkan konsep *governance* sebagai landasan bagi organisasi pemerintah dalam melaksanakan roda organisasinya yang mana melibatkan peran serta aktor non pemerintah dari pihak swasta atau masyarakat. padadigma *governance*, pada perjalanannya menjadi *trigger* munculnya konsep kolaborasi dalam manajemen publik yang disebut dengan konsep *collaborative governance* (CG). Konsep CG hadir sebagai langkah bagi pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks dan bersifat interorganisasi dalam penyelesaiannya, sehingga membutuhkan suatu kerja sama atau kolaborasi. Namun salah besar apabila CG dipahami sebagai semacam *panacea* atau obat mujarab dalam penyelesaian masalah-masalah publik (Torfing et al, 2012). Meskipun begitu, konsep CG layak dipilih pemerintah dalam rangka manajemen publik, termasuk dalam pengelolaan sampah. Emerson dan Nabatchi (2015) menghadirkan *rolemodel* penyelenggaraan kolaborasi yang meliputi komponen *collaboration dynamics*, *collaboration actions*, dan *adaptation* baik dalam proses perumusan kebijakan maupun pelaksanaannya.

Salah satu bentuk dari praktik CG yakni adanya keterlibatan masyarakat dalam manajemen publik dimana pemerintah sebagai inisiatornya (Emerson dan Nabatchi, 2015). Oleh karena itu, dalam pengelolaan sampah di Kota Batu, pemerintah melibatkan kelompok bank sampah yang didukung dengan adanya Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu No 180/16/KEP.DLH/422.110/2017 tentang pembentukan

Pengurus Komunitas Bank Sampah Kota Batu yang selanjutnya diberi nama Komunitas Bank Sampah Kartini Sejati dan mengkoordinir 66 kelompok bank sampah di Kota Batu.

Dalam proses kolaborasi, komunitas bank sampah (KBS) terlibat dalam proses perumusan program kegiatan DLH tahun 2018. Saran dan gagasan dari KBS dapat diterima secara langsung oleh DLH sehingga menghasilkan kegiatan pelatihan administrasi bank sampah dan pengelolaan sampah. Pada tahun 2017, permintaan KBS perihal fasilitas timbangan dan kantor sekretariat pun diakomodir oleh DLH. Lebih lanjut, KBS juga terlibat secara teknis dalam beberapa kegiatan pengelolaan sampah seperti dalam bentuk kegiatan pemilahan sampah dan penabungan sampah tiap bulan; pengelolaan sampah melalui daur ulang sampah menjadi kerajinan dan kompos; dan pelatihan kepada 66 kelompok-kelompok bank sampah di Kota Batu; dan kegiatan bersih sungai di Kota Batu yang disebut kegiatan Sapu Bersih Nyemplung Kali (Saber Pungli).

Praktik kolaborasi pengelolaan sampah di Kota Batu nyatanya tidak secara menyeluruh berjalan dengan lancar. Beberapa kendala muncul dalam prosesnya baik dari segi dukungan regulasi atau kebijakan yang secara teknis mengarah pada penyelenggaraan kolaborasi. Oleh karena itu, dibutuhkan semacam Peraturan Walikota atau SK Kepala DLH yang secara teknis menjadi aturan dan panduan kolaborasi pengelolaan sampah antara pemerintah dan masyarakat. Di sisi lain, kendala juga muncul dari minimnya inovasi dari KBS dalam pengelolaan sampah yang hanya bertumpu pada kegiatan pemilahan, daur ulang, komposting. Sehingga perlu dilakukan inovasi lain, seperti melakukan budidaya cacing yang mana dapat memanfaatkan sampah organik dan juga memberikan pendapatan yang signifikan bagi anggota bank sampah, dibandingkan hanya dengan melakukan kegiatan pengelolaan sampah yang masih tergolong *mainstream*. []

PROFIL DAN INFORMASI PENDAFTARAN PRODI ILMU PEMERINTAHAN

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

Visi Menjadikan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-UMM sebagai pusat pendidikan yang unggul dalam pengembangan ilmu serta praktik pemerintahan bertaraf internasional untuk mendukung terwujudnya *Effective Government* sebagai perwujudan nilai-nilai Islam.

- Misi**
1. Menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkan pola pikir, wawasan, dan keterampilan mahasiswa di bidang Ilmu Pemerintahan yang berorientasi pada pemerintahan daerah (*local government*) yang berdaya saing internasional.
 2. Mengembangkan riset dan kajian Ilmu Pemerintahan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif (*effective government*).
 3. Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan demokrasi dan pemberdayaan masyarakat sipil (*civil society*).
 4. Meningkatkan jaringan kemitraan yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi (TKI).
 5. Meningkatkan kompetensi keilmuan dan keterampilan pemerintahan bagi mahasiswa agar berdaya saing internasional dan berakhlak mulia.

Tujuan Pembelajaran :

1. Menguasai dasar-dasar Ilmu Pemerintahan dan keterampilan dasar bidang Pemerintahan
2. Mampu mengidentifikasi permasalahan di bidang Pemerintahan.
3. Mampu mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan pemerintahan secara komprehensif dan akurat.

4. Menguasai prinsip dasar demokrasi guna mewujudkan masyarakat sipil yang berdaya *civil society*.
5. Memiliki kepekaan dan tanggung jawab etik dalam menegakkan amarah sebagai ilmuwan dan praktisi Ilmu Pemerintahan.

Tempat Pendaftaran :

UPT PMB Universitas Muhammadiyah Malang
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 6514, Telp.0341-464318-19 Psw. 139.
Fax. 0341-460435, 460782. e-mail: pmb@umm.ac.id.

Pendaftaran on-line : pmb.umm.ac.id. call center: +62 341 463513.

Jalur Pendaftaran :

Program Jalur Undangan/ Jalur Prestasi & PMDK; Program Reguler; Program Beasiswa Khusus Votir / Yatra-2018; Program Beasiswa PPLT; Program Transfer dan Alih Jenjang

Prosedur Pendaftaran :

- a. Mengisi biodata peserta secara *online* pmb.umm.ac.id
- b. Melakukan pembayaran secara transfer melalui BNI No. Rek. 6006002464 (Tidak menerima transfer pembayaran via ATM/SMS Banking/ e-Banking)
- c. Formulir cetak *online* dan semua berkas syarat pendaftaran dimasukkan dalam amplop coklat dan dikirim ke alamat: **UPT PMB Universitas Muhammadiyah Malang** Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 65144
- d. Pengiriman Berkas pendaftaran melalui pos dan *enak*.